

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam konteks penguatan populisme di Indonesia dan Filipina antara tahun 2018 hingga 2023, terdapat perbandingan mengenai kinerja partisipasi politik dan kebebasan berpendapat di kedua negara tersebut. Populisme, dengan karakteristik otoriter dan kurang mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, telah mempengaruhi sistem politik dan kebebasan berpendapat di kedua negara. Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Tingkat partisipasi dalam pemilihan umum cenderung tinggi, menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih wakil politik mereka. Namun, kehadiran populisme telah menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan kebebasan berpendapat di Indonesia. Kontrol media dan penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi faktor-faktor pembatas kebebasan berpendapat dan mengancam demokrasi. Di Filipina, survei menunjukkan adanya penurunan preferensi publik terhadap demokrasi dari tahun 2016 hingga 2018. Undang-Undang Bayanihan, yang diberlakukan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat.

Kontrol media dan penindasan kritik terhadap pemerintah adalah beberapa dampak negatif dari populisme di Filipina. Secara keseluruhan, populisme memiliki dampak merugikan terhadap partisipasi politik yang kritis dan kebebasan berpendapat di Indonesia dan Filipina. Kepemimpinan politik yang otoriter, kontrol media, dan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi dinamika politik semuanya memperburuk situasi demokrasi di kedua negara. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah penting seperti penguatan lembaga-lembaga demokratis, perlindungan kebebasan berpendapat, promosi partisipasi politik yang inklusif, dan penanganan isu-isu yang mendorong popularitas populisme, seperti ketidakadilan sosial dan korupsi. Kerja sama antara

pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor politik lainnya juga diperlukan untuk melindungi nilai-nilai demokrasi dan memastikan stabilitas politik di masa depan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa di tengah penguatan populisme, partisipasi politik yang kritis dan kebebasan berpendapat di Indonesia dan Filipina membutuhkan perlindungan dan pemantauan yang lebih baik guna menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin keberlanjutan kedua negara ini.

